

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tumbuh dan berkembangnya organisasi Islam dengan bentuk gerakan jihad di Indonesia mendapat dukungan massa. Mereka mendapat tempat di tengah masyarakat mayoritas muslim. Mereka menampilkan gerakan jihad kepada massa Islam sebagai bentuk alternatif penyelesaian terhadap persoalan kekinian bangsa Indonesia. Gerakan ini berhasil merawat basisnya lewat dakwah amar makruf nahi munkar dan pembinaan fisik (idad).

Organisasi gerakan Islam digerakkan oleh aktivis jihadi. Mereka berhadapan dengan rezim dukungan Amerika Serikat dan sekutunya. Ini terkait keterlibatan kelompok jihadi dalam kasus teror di Indonesia. Jejaring kelompok jihadi Indonesia terhubung dengan gerakan jihad internasional. Karenanya, kampanye melawan aksi terorisme selalu dikaitkan dengan gerakan melawan kelompok fundamentalisme agama yang dikumandangkan Amerika Serikat.

Hal ini menjadi agenda utama sejak peristiwa serangan terhadap gedung kembar World Trade Center (WTC) dan pusat komando pertahanan militer AS di Pentagon. Agenda ini menjadi bagian utama dari perang Amerika Serikat melawan terorisme global. Sejumlah negara juga turut serta di dalam kampanye anti-terorisme. Indonesia pada akhirnya ikut terlibat dalam kontra terorisme ini. Terlebih sejak serangkaian kejadian pengeboman di sejumlah wilayah di Indonesia yang membawa ke arah akumulasi ancaman yang tidak berujung.

Alhasil aksi terorisme menjadi bagian dari kejahatan lintas negara yang melibatkan banyak pihak. Dari data laporan NCB Interpol Indonesia, sejak tahun 2000 sejumlah kasus kejahatan transnasional bermotif agama/ideologi berupa terorisme memiliki skala besar. Kasus teror bom yang memiliki dampak signifikan di antaranya, bom malam natal tahun 2000, kasus bom Bali I tahun 2002, dan serangan bom di Parliament

Building dan hotel JW Marriot tahun 2003.<sup>1</sup> Serangkaian bom kembali terjadi, pada tahun 2004 bom meledak di kedutaan besar Australia, setahun setelah itu bom kembali meledak di Bali atau dikenal sebagai Bom Bali II tahun 2005, dan tahun 2009 kasus bom Mega Kuningan Jakarta.

Serangan bom ini dikaitkan dengan anggota Jamaah Islamiyah. Sejumlah pelaku terindikasi merupakan bagian dari Jamaah Islamiyah. Seperti tampak pada kasus bom Bali I terpidana Ali Gufron, Amrozi, dan Imam Samudra merupakan jaringan JI dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Bahkan pada tahun 2003 pasca ledakan di Legian, Bali Post melansir berita 87 anggota JI berhasil ditangkap dan ditempatkan pada lokasi yang berbeda.<sup>2</sup>

Kehadiran JI sendiri merupakan pecahan dari Darul Islam pimpinan Ajengan Masduki. Perpecahan ini akibat perbedaan sikap antara Ajengan Masduki dengan Abdullah Sungkar. Setelah keluar dari DI, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir membentuk jamaah baru di Malaysia. Kelompok baru ini kemudian diresmikan dengan nama Jamaah Islamiyah mengacu dengan organisasi Jama'ah Islamiyah yang ada di Mesir. Terlebih memiliki tujuan yang sama dengan JI Mesir.<sup>3</sup>

Organisasi ini menjadi lebih radikal sejak sebagian anggota DI alumni perang Afghanistan yang ikut terlibat dalam front Al Qaeda membawa pengaruhnya ke JI. Melalui jejaring ini kemudian banyak anggota JI memiliki ikatan dengan Al Qaeda. Berdasarkan dari proses penyelidikan dan hasil pembuktian di depan pengadilan banyak dari pelaku serangan Teroris mengaku di dasari atas dorongan jihad atas nama Islam, dan mereka juga anggota JI yang dipengaruhi fundamentalisme Islam Al Qaeda.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/68-antara-terrorisme-negara-dan-perjuangan>, diakses pukul 1:12 WIB, tanggal 2 Februari 2015.

<sup>2</sup> <http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2003/8/19/p1.htm>, diakses pukul 7:48 WIB, tanggal 4 Februari 2015.

<sup>3</sup> Solahudin, *NII sampai JI: Salafi Jihadisme di Indonesia*, Komunitas Bambu, 2011, hal. 235.

<sup>4</sup> Ansyad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, AS Production Indonesia, 2014, hal 17.

Fase ini memperlihatkan diaspora gerakan Islam radikal transnasional ke Indonesia terutama sejak peristiwa serangan teror terhadap gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat. Disamping itu, kelompok fundamentalisme agama ini juga melakukan penyesuaian pola gerakan di dalam situasi medan jihad dengan kondisi yang berbeda. Hal ini juga terlihat ketika sejumlah aktivis JI berusaha merubah strategi perjuangan mereka dari gerakan bawah tanah ke area dakwah yang lebih terbuka.

Kelompok gerakan radikal Islam yang dulunya menghadapi refresifitas aparat dapat bernafas lega setelah rezim Orde Baru yang militeristik berakhir oleh desakan reformasi. Setelah mereka kembali dari pelarian maka para buronan kelompok radikal Islam yang terlibat kasus makar politik ini kemudian melahirkan sejumlah agenda sendiri.

Ketika kembali ke Indonesia sebagian anggota JI melepaskan bendera JI dengan membentuk wadah perjuangan baru. Walaupun keterlibatannya dengan JI dibantah sendiri oleh Abu Bakar Ba'asyir.<sup>5</sup> Sebelum mendirikan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba'asyir tergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia. Sebuah front perjuangan bersama diantara kelompok Islam yang menginginkan ditegakkannya Syari'ah Islam pada semua aspek yang menyangkut aktivitas keseharian dalam kehidupan. Pada konteks ini Syari'ah Islam harus menjadi rujukan tunggal bagi tata politik pemerintahan secara nasional dan internasional.<sup>6</sup> Bahkan pada kongres pertama tahun 2002 Abu Bakar Baasyir terpilih menjadi Amir Majelis Mujahidin Indonesia.

Tahun 2008 setelah menghabiskan waktu keluar masuk penjara Abu Bakar Ba'asyir kembali memimpin MMI. Namun usaha untuk meluruskan sistem organisasi di MMI tidak membuahkan hasil. Menurut Abu Bakar Ba'asyir sistem kepemimpinan yang di jalankan di MMI

---

<sup>5</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/17/nas7.htm>, diakses pukul 13:54 WIB, tanggal 4 Februari 2015.

<sup>6</sup> <http://www.majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/>, diakses pukul 14:25 WIB, tanggal 4 Februari 2015.

tidak sesuai syariat Islam.<sup>7</sup> Baginya sistem kepemimpinan Islam itu menganut konsep Al Jamaah wal Imamah.<sup>8</sup>

Setelah mundur dari MMI, ABB mendirikan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pada tahun 2008. Melalui JAT prinsip gerakan dakwah Islam yang diusung ABB kembali dihidupkan. Namun sejak awal 2010 hingga 2013 sejumlah kasus terorisme banyak melibatkan anggota JAT. Bahkan amir JAT Abu Bakar Ba'asyir harus meringkuk kembali di dalam penjara terkait keterlibatannya dalam pendanaan pelatihan militer di Aceh.<sup>9</sup>

JAT menambah panjang daftar organisasi yang dianggap terlibat dalam jaringan terorisme internasional. Selain Jemaah Islamiyah yang telah masuk dalam daftar organisasi terorisme, JAT juga tercantum dalam daftar serupa. Dari daftar organisasi terorisme yang dipublikasikan oleh badan penanggulangan terorisme Amerika Serikat, National Counterterrorism Center (NCTC), JAT ialah salah satu diantaranya. Berdasarkan pemetaan wilayah operasi maka JI meliputi Asia Tenggara sedangkan aksi JAT hanya beroperasi di wilayah-wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

Perubahan strategi JAT dari gerakan dakwah kearah radikalisasi yang ekstrim oleh sebagian anggotanya menjadi hal dilematis bagi kelangsungan organisasi ini. Pada saat yang sama banyak anggota JAT harus mendekam di dalam penjara akibat terlibat aktif aksi-aksi teror. Bahkan walau hanya terlibat dalam membantu pelarian pelaku teror tersebut. Hal ini dilakukan demi solidaritas kelompok sehingga banyak yang tidak terlibat secara langsung juga terkena dampaknya.

Ansyaad Mbai mengungkapkan ada dinamika baru dari gerakan kelompok Islam Radikal di Indonesia terutama yang berhubungan langsung dengan tokoh JAT. Pada kasus Aceh misalnya, proyek

---

<sup>7</sup> <http://news.detik.com/read/2008/08/05/135031/983207/10/surat-pengunduran-diri-baasyir-dari-majelis-mujahidin>, diakses pukul 22:07 WIB, tanggal 7 Februari 2015.

<sup>8</sup> <http://www.annah.com/read/2008/08/06/2068-ustadz-abu-bakar-baasyir-mundur-dari-mmi.html>, diakses pukul 22:10 WIB, tanggal 7 Februari 2015.

<sup>9</sup> Ansyaad Mbai, *Opcit*, hal 8.

<sup>10</sup> <http://www.nctc.gov/site/groups/jat.html>, diakses pukul 23:03 WIB, tanggal 7 Februari 2015.

mengembangkan *qaidah aminah* yang digagas oleh Dulmatin mendapat dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir, Amir JAT. Proyek Lintas Tanzim Aceh merupakan persekutuan dari pelbagai kelompok jihad di Indonesia. Kelompok jihad yang tergabung diantaranya, JAT, Kelompok Ring Banten, Mujahidin KOMPAK, dan Tauhid wal Jihad.<sup>11</sup>

Selain kasus Lintas Tanzim Aceh yang gagal, proyek *qaidah aminah* dari kelompok JAT yang cukup berhasil berkembang ialah sel jihad di Poso. Langkah awal dari *qaidah aminah* Poso ialah melalui pelatihan militer dan pembentukan JAT Poso. Kelompok ini berada dibawah pimpinan Santoso. Kelompok Santoso aktif merekrut anggota-anggota baru untuk turut bergabung dalam operasi bersenjata di sekitar wilayah Poso.<sup>12</sup>

Pada konteks ini, ada dua faktor yang mendorong lahirnya gerakan sosial Islam radikal di Indonesia. Besarnya tekanan terhadap kelompok Islam dalam hal akses sumber daya ekonomi dan politik yang terbatas. Padahal mereka adalah bagian dari mayoritas penduduk Indonesia. Keberadaan mereka kerap kali hanya menjadi komoditi ekonomi dan politik menjelang pemilihan umum. Kedua, rangkaian transformasi politik muslim di dunia saat ini yang membawa dampak signifikan penyatuan agenda gerakan. Identitas politik Islam yang dibangun berdasarkan pemahaman yang sama tentang kemunduran peran Islam.

Samuel P. Huntington mencatat tanggapan atas kemunduran peran Islam dan peminggiran para aktivis muslim dalam politik diberbagai wilayah dengan penduduk mayoritas muslim ialah pemicu lahirnya kelompok gerakan perlawanan. Dari tahun 1980-an dan 1990-an, aktor-aktor non negara lebih mewarnai isu internasional, gerakan-gerakan Islam mendominasi dan memonopoli aksi penentangan di negara-negara Islam terhadap rezim yang berkuasa.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ansyad Mbai, *Opcit*, hal 24.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 30-31.

<sup>13</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Qalam, 1996, hal. 189.

Lebih jauh menurut Samuel P. Huntington, salah satu bagian yang menjadi unsur penting dari kebangkitan Islam yaitu fundamentalisme Islam sesuatu yang identik dengan gerakan politik Islam. Walaupun makna kebangkitan Islam memiliki pengertian yang luas namun kerap kali maknanya tidak lebih terang dengan atribut politiknya. Kebangkitan tersebut pada dasarnya mencakup ide-ide, praktik-praktik, retorika, dan purifikasi ajaran Islam yang digerakkan umat Islam.<sup>14</sup>

Jika pada era Orde Baru kelompok Islam radikal yang berusaha mendirikan negara berbasiskan Islam akan dianggap sebagai separatisme Islam. Sebaliknya saat ini kelompok radikalisme Islam cenderung dilekatkan sebagai kelompok fundamentalisme agama yang dekat dengan aksi terorisme. Demikian halnya dengan JAT yang merupakan salah satu kelompok gerakan Islam di Indonesia. Pada konteks sosio politik JAT merupakan bagian dari jaringan Islam transnasional. Transformasi JAT dalam usaha mengelola tantangan dan tuntutan internal dan eksternal menjelaskan dinamika kelompok ini lebih kompleks dan akan menjadi fokus bahasan berikutnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berusaha menguraikan dinamika gerakan Islam radikal yang belakangan muncul dengan agenda formalisasi syariat, pendirian Daulah Islamiyah/Khilafah Islamiyah, dan penolakan terhadap agenda Barat. Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang kajian ini, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktek Gerakan Islam Radikal di Indonesia oleh Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).
2. Mengatahui pola relasi ideologis dan strategis diantara kelompok gerakan Islam radikal yang memiliki kesamaan agenda dengan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) .

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 181.

3. Mengetahui pengaruh kampanye anti terorisme di Indonesia melalui pembentukan opini negatif terhadap gerakan Islam radikal di tengah masyarakat.
4. Mengetahui dampak gerakan Islam radikal di Indonesia.

### **C. Kontribusi Penelitian**

1. Memberikan gambaran terhadap fenomena gerakan Islam radikal yang bermotif agama. Dengan menjelaskan gagasan yang menjadi prinsip gerakan radikal tersebut, dorongan yang membentuk sikap dan pilihan, dan memahami proses dinamika tujuan dari perubahan sosial yang hendak mereka wujudkan.
2. Menambah wawasan masyarakat sipil dan pemerintah dalam menropong perkembangan gerakan Islam di dalam praktek dan keberlanjutannya hingga hari ini.
3. Menjenihkan stigma dan pengertian gerakan radikal Islam yang muncul ditengah masyarakat terutama yang membentuk “pengetahuan umum” ke dalam sikap proporsional dalam melihat persoalan atas gerakan perlawanan kelompok keagamaan.
4. Hasil dari pengkajian diharapkan dapat menjadi dasar dari pengambilan kebijakan yang obyektif dalam menilai aspirasi kelompok ini.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik, tujuan, interpretasi ajaran, dan metode perjuangan Jamaah Ansharut Tauhid dalam mewujudkan tujuan organisasi?
2. Mengapa Jamaah Ansharut Tauhid mengalami proses radikalisasi dalam pemikiran politik keagamaan ?

## E. Studi Pustaka

Abad 20 melahirkan banyak negara/bangsa yang merdeka. Di kawasan Asia dan Afrika misalnya, mereka menemukan kesatuan politik yang memaksa hidup di dalam satu komunitas baru dengan struktur politik dunia yang terintegrasi satu sama lain dan telah banyak berubah pula. Penemuan satu identitas kebangsaan ini membentuk watak dan identitas kolektif bersama sebagai sebuah bangsa. Sedangkan bangsa merupakan komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus memiliki kedaulatan.<sup>15</sup>

Unsur-unsur pembentuk kebangsaan itu lahir dalam kesejarahan material dan obyektif. Sedangkan norma yang membentuk ikatan diantara setiap anggota kelompok ialah konsensus bersama untuk hidup dalam satu komunitas tertentu. Norma itu digali dari kesadaran etik masing-masing kelompok untuk mewujudkan hormani di dalam komunitas tersebut.

Pada konteks Indonesia, sebagai suatu komunitas kebangsaan yang besar, Soekarno mencoba berusaha memformulasikan gagasan nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM). Konsepsi tidak cukup berhasil malah melahirkan pemberontakan kelompok Islam (DI/TII), dan belakangan menyusul peristiwa G 30 S, kemudian mengakhiri peran Partai Komunis Indonesia (PKI) dari gerakan kiri di Indonesia.

Sejarah mencatat pengaruh Komunisme dan Islamisme telah membentuk gerakan sosial ketika pamor dari otoritas feodal mulai mereduk dibawah kekuasaan kolonial. Ini dapat terlihat setelah pemberontakan Diponegoro berakhir maka gerakan perlawanan atas kolonialisme di dorong oleh kelompok-kelompok sosial politik yang ada ditengah masyarakat.

Misalnya, penelitian Sartono Kartodirjo mengenai aspek religio-politik pada pemberontakan petani banten menurutnya dilatarbelakangi

---

<sup>15</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, Insist dan Pustaka Pelajar, 2002, hal. 8.



ketidakpuasaan dan frustrasi sosial terhadap penguasa kolonial.<sup>16</sup> Selanjutnya gerakan yang lebih modern yaitu Sarekat Islam (SI), didirikan pada tahun 1912 di Surakarta. Menurut Vander Wal, SI merupakan suatu gerakan sosial politik bertujuan menghidupkan nilai-nilai keagamaan, mencapai kesejahteraan ekonomi, dan meninggikan martabat kaum bumi putra.<sup>17</sup> Kemudian SI pecah menjadi dua kelompok dikenal dengan SI Putih dan SI Merah. Kelak SI Merah membentuk organisasi politik sendiri yaitu PKI. Organisasi PKI menjadi lebih radikal lagi yang diikuti oleh peristiwa pemogokan sampai aksi bersenjata di Jawa Barat pada 12 November 1926 dan 1927 di Jawa Tengah.<sup>18</sup>

Pada aspek kesejarahan gerakan sosial di Indonesia punya ragam bentuk seperti dijelaskan diatas. Sejauh ini kajian Islam di Indonesia terlihat masih kurang memuaskan untuk menjelaskan fenomena gerakan Islam saat ini. Seperti studi yang telah dilakukan Deliar Noer membagi Islam dalam dua kategori yaitu Islam Tradisionalis dan Islam Modernis.<sup>19</sup> Cara pandang dikotomis tradisional-modernis mengidentifikasi ormas yang dilabeli demikian. Pengikut ormas keagamaan NU dan Persatuan Tarbiyah (PERTI) misalnya menganut Islam Tradisionalis sedangkan Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Al-Irsyad beraliran Islam Modernis.<sup>20</sup>

Menurut Aziz dkk, persinggungan kedua kelompok ini akhirnya melahirkan suatu generasi baru. Secara evolutif mereka mulai menemukan cara pandang yang berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi ini mewakili berbagai aliran di dalam model pemahaman keagamaan. Jika

---

<sup>16</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Pustaka Jaya, 1984, hal.

<sup>17</sup> A.P.E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil ?*, Grafiti Pers, 1985, hal. 27.

<sup>18</sup> Soe Hok Gie, *Orang-Orang Kiri Dipersimpangan Jalan, Bentang*, 2005, hal. 12

<sup>19</sup> Deliar Noer membagi dua model gerakan yang sifatnya modernis, pertama, gerakan yang berorientasi pendidikan dan sosial seperti, gerakan-gerakan yang muncul di Minangkabau, gerakan Islam di kalangan masyarakat/keturunan Arab, lalu gerakan persyerikatan ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Kedua, gerakan modernis Islam berorientasi politik seperti Sarekat Islam dan Partai Muslimin Indonesia (PMI).

<sup>20</sup> Iman Thalkah dan Abdul Aziz, "*Gerakan Islam kontemporer di Indonesia, Sebuah Kajian Awal*", dalam Abdul Aziz dkk, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Firdaus, 1994, hal 3-6.

corak keagamaan aliran “tradisional-modernis” berorientasi gerakan keagamaan dan politik maka kelompok gerakan-gerakan kontemporer pasca “tradisional modernis” memiliki dimensi lintas aliran dan kultural.<sup>21</sup>

Aziz dkk, lebih lanjut, merujuk kepada sejumlah gerakan keagamaan yang muncul di era 1970an seperti gerakan Islam Jamaah, gerakan kelompok Islam Isa Bugis, Jamaah Islam Qurani, gerakan kaum muda Islam masjid Salman, dan kelompok Islam di Yogyakarta. Jika berdasarkan pada penelitian ini maka usaha depolitisasi Islam oleh Orde Baru telah berhasil menarik gerakan keagamaan keluar dari orientasi politiknya.

Hal serupa dikemukakan oleh Effendi, ketika rezim Orde Baru berhasil berkuasa permintaan kelompok muslim untuk merehabilitasi Masyumi tidak menemukan jalan. Kelompok militer masih menaruh curiga dengan agenda Islam politik.<sup>22</sup> Bahkan pasca pemilu tahun 1971 pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai politik. Partai beraliran Islam seperti NU, Parmusi, dan Perti diharuskan bergabung ke dalam satu partai politik baru. Keempatnya lalu meleburkan diri ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>23</sup>

Rezim Orde Baru masih menyimpang kecurigaan terhadap bangkitnya ancaman gerakan politik Islam. Kebijakan berikutnya akan mempengaruhi hubungan kelompok Islam dengan rezim Orde Baru. Terlebih ketika lahir Undang-Undang keormasan 1985 yang mensyaratkan penyatuan asas bagi setiap organisasi. Semua organisasi wajib menganut asas tunggal pancasila. Maka organisasi mahasiswa dan organisasi sosial keagamaan diharuskan menerima Pancasila sebagai asas mereka.<sup>24</sup>

Pengaruh dari berbagai kebijakan ini berdampak pada hubungan kelompok Islam dengan rezim Orde Baru tidak harmonis. Usaha

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 13.

<sup>22</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, 1998, hal. 112.

<sup>23</sup> Ibid, hal 118.

<sup>24</sup> Ibid, hal 122.

peminggiran terhadap tokoh-tokoh Islam pada panggung politik nasional hanya mengentalkan rasa permusuhan kelompok Islam. Hal ini berlanjut, ditandai dengan sejumlah gerakan perlawanan oleh aktivis radikal muslim.

Dari tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1980-an sejumlah gerakan perlawanan kelompok Islam muncul kepermukaan. Tercatat gerakan Warman tahun 1978, yang mengaku mewarisi semangat Kartosuwiryo, dia dieksekusi mati karena makar terhadap negara dan aksi kekerasan yang dilakukannya. Tahun 1981 terjadi konfrontasi fisik aparat militer dengan gerakan Imran. Ia mengobarkan revolusi Islam di Indonesia. Kasus lainnya, yang di anggap bagian dari aksi aktivisme kelompok Islam yaitu kasus bom BCA, pengeboman Borobudur, dan peristiwa berdarah Tanjung Priok.<sup>25</sup>

Selain faktor domestik yang membentuk radikalisasi kelompok Islam tersebut. Pengaruh dari situasi politik internasional terutama kawasan Timur Tengah berkontribusi membentuk gerakan perlawanan kelompok Islam di Indonesia. Dalam hal ini, menurut Eickelman dan Piscatori, tumbuhnya hubungan transnasional diantara muslim di dorong oleh tiga faktor yaitu pertama, bertambah luasnya jangkauan aktor-aktor non negara dalam gerakan dakwah Islam. Aspek kedua yaitu solidaritas yang diterjemahkan pada pemaknaan politik yang sama terhadap penderitaan kaum muslim minoritas. Oleh karena itu, batas-batas negara menjadi tidak relevan dalam hubungan diantara sesama komunitas muslim. Dan ketiga, orang-orang muslim menaruh perhatian pada isu-isu yang menyangkut kepentingan Islam. Terlebih ketika “Barat” menyerang simbol-simbol Islam maka akan muncul kepedulian lintas negara dari komunitas muslim.<sup>26</sup>

Dampak dari aspek transnasional Islam tersebut menegaskan apa yang digambarkan dalam buku “Arus baru Islam radikal, transmisi revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia”. Pada tulisan ini Imdadun

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 123

<sup>26</sup> Dale F Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim Wacana Kekuasaan Hegemoni dalam masyarakat Muslim*, Tiara Wacana Yogyakarta, 1998, hal. 182-187.

Rahmat menjelaskan bahwa potret gerakan Islam radikal yang belakang muncul dengan aksi kekerasan dan terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan revivalisme Islam di Timur Tengah. Paling tidak sejak tahun 1980an transmisi ini sudah berlangsung.

Dalam konteks ini pula, Imdadun Rahmat mencatat beberapa organisasi Gerakan Islam baru (New Islam Movement) yang dipengaruhi oleh gerakan Islam di Timur Tengah. Pengaruh transmisi itu dapat kita lihat pada gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Fron Pembela Islam (FPI), dan Kelompok Salafi. Kelompok salafi diantaranya seperti, Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia.<sup>27</sup> Bahkan Majelis Mujahidin Indonesia dianggap memiliki keterkaitan dengan organisasi Ji yang juga berhubungan dengan Al Qaidah.

Gerakan Islam baru ini menemukan momentum penting ketika Orde Baru tumbang, berbeda dengan kelompok gerakan Islam yang lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al Washliyah, Jamiat Khair dan lainnya. Ada perbedaan dalam wacana dan gerakan dengan kelompok yang lama. Seperti halnya pada gerakan Tarbiyah (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad dan Majelis Mujadidin Indonesia merepresentasikan generasi baru gerakan Islam di Indonesia.<sup>28</sup>

Pada kasus Surakarta misalnya, penelitian Fananie dkk menggali informasi dari beberapa organisasi gerakan radikalisme keagamaan yang terbentuk sejak Orde Baru berakhir diantaranya, Majlis Ta'lim Al-Islah, Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), Barisan Bismillah, KAMMI, Brigade Hizbullah, Gerakan Pemuda Kabah, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Jundullah, dan Laskar Jihad.<sup>29</sup> Secara umum organisasi ini memiliki orientasi gerakan yang radikal, militan, dan fundamentalis. Ada

---

<sup>27</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Balik Islam Radikal: Transmisi Islam Ke Timur Tengah ke Indonesia*, Erlangga, 2007, hal. 75

<sup>28</sup> M. Imdadun Rahmat, *Ibid*, hal. 135.

<sup>29</sup> Zainuddin Fananie dkk, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, The Asia Foundation, 2002, hal. 37.

dua hal yang membuat organisasi kerap kali menimbulkan persoalan ditengah masyarakat. Pertama, sikap intoleransi yang diperlihatkan melalui protes atau demonstrasi dan bahkan berujung pada tindakan kekerasan. Kedua, keberadaan group paramiliter yang dibentuk organisasi ini.<sup>30</sup>

Disisi lain, dengan alur dinamika berbeda justru pada tahun 1970-an dengan bergesernya arus pengaruh tokoh Islam kepada generasi baru pemikir dan aktivis Islam kemudian mendorong langkah pembaharuan agenda politik Islam. Para tokoh pembaharu ini kelak mewarnai wacana pemikiran Islam di Indonesia. Mereka mengedepankan aspek substansial Islam daripada bentuk. Abd A'la mengidentifikasi para pembaharu ini kelompok neomodernisme.<sup>31</sup>

Nurcholish Majid, salah seorang pendorong dari lokomotif gerakan pembaruan ini. Dengan nada kritis Nurcholish Majid melambungkan istilah “Islam Yes, Partai Islam, No”, reaksi ini muncul akibat melihat kejumudan alam pemikiran gerakan Islam.<sup>32</sup> Selain itu, kita menengenal sejumlah tokoh seperti Harun Nasution, M. Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid, dan Munawir Sjadzali yang tulisannya mereproduksi makna baru gerakan Islam. Menurut Dawam Rahardjo, dasar dari prinsip gerakan ini meliputi tiga wilayah: (1) pembaruan teologis/keagamaan, (2) reformasi politik/birokrasi, dan (3) transformasi sosial.<sup>33</sup>

Selanjutnya, berpijak pada alur konsep diatas maka klasifikasi berikutnya yang menentukan ciri wacana intelektual Islam di ruang publik saat ini dapat dibedakan menjadi dua model yaitu Islam Moderat dan Islam Fundamental. Islam Moderat mewakili kelompok neomodernis Islam. sedangkan Istilah Islam Fundamental disejajarkan dengan

---

<sup>30</sup> Zainuddin Fananie *dkk, Ibid*, hal 6-7.

<sup>31</sup> Abd A'la, *Dari Neo Modernisme ke Islam Liberal, Paramadina*, 2003, hal. 227-228.

<sup>32</sup> Nurcholish Majid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesian*, Mizan, 2008, 226-227.

<sup>33</sup> Bahtiar Effendy, *Opcit*, hal. 126.

pemaknaan neo fundamentalis atau fundamentalis kontemporer sesuai dengan pengertian yang dijelaskan Nor Huda.<sup>34</sup>

Berikut ini merupakan klarifikasi teoritis atas pengertian konseptual Fundamentalisme Islam, serta istilah-istilah yang memiliki hubungan dengan wacana ini, seperti Islam Radikal, Terorisme, dll. Lanjut menurut Nor Huda, gerakan fundamentalis Islam awal lahir di semenanjung Arabia, tokoh utamanya Muhammad bin Abdal-Wahab.<sup>35</sup> Ia melancarkan pemurnian ajaran Islam. Suatu gerakan purifikasi terhadap praktek agama yang menyimpan dari ajaran Islam misalnya bi'dah, khurafat, dan takhayul.<sup>36</sup>

Sebaliknya menurut Nurcholish Majid, fundamentalisme Islam merupakan gejala ekspresi radikal dari kelompok Islam. Meski seringkali bermakna negatif, fundamentalisme Islam justru memiliki fungsi positif menjaga secara keseluruhan sistem sosial. Suatu mekanisme penegasan pesan-pesan Islam agar sepenuhnya tetap berpengaruh bagi komunitas muslim. Disisi lain, menurutnya, istilah fundamentalisme Islam dapat berkonotasi negatif dalam kaitannya dengan dasar ideologi fundamentalisme yang menolak Westernisme.<sup>37</sup>

Sejalan dengan pemaknaan diatas, kata Fundamentalisme merujuk kepada kosa kata Arab al-Usuliyah oleh para penelitik di Barat menggunakan kata ini bermakna suatu era kebangkitan Islam atau zaman pencerahan Islam. Seperti yang tampak pada gerakan kontemporer Islam.

---

<sup>34</sup> Azyumardi Azra, dalam Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, 2013, hal. 168.

<sup>35</sup> Hamid Algar menyajikan riwayat tokoh Muhammad ibn Abd al-Wahab dalam buku berjudul *Wahabisme Sebuah Tinjauan Kritis*. Menurutnya, Muhammad ibn Abd al-Wahab yang dikenal berwatak keras, puritan, dan intoleran. Pada konteks Indonesia, kelompok Islam demi menahan ekspansi Wahabisme di Nusantara maka didirikan ormas keagamaan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926.

<sup>36</sup> Nor Huda, *Opcit*, 168-169.

<sup>37</sup> Nurcholish Majid, *Opcit*, hal. 67-68.

Terlebih ketika konsep ini banyak digunakan para peneliti Barat untuk menjelaskan fenomena Revolusi Islam Iran tahun 1979.<sup>38</sup>

Kelompok yang menganut fundamentalisme Islam merupakan bagian dari radikalisme Islam. Miminjam penafsiran Riza Sihbudi dalam diskursus yang berkembang saat ini, terutama yang berkaitan dengan radikalisme Islam. “Pada sejumlah literatur, istilah radikalisme, fundamentalisme, revivalisme, atau neo fundamentalisme Islam memiliki penafsiran yang kurang lebih sama dengan kembali merujuk pada fenomena kebangkitan gerakan Islam.”<sup>39</sup>

Ironisnya hingga hari ini setelah peristiwa serangan teror 11/9 di Amerika Serikat penggunaan istilah diatas diperlakukan secara bias. Bahkan motif kepentingan politik dan ekonomi cenderung mendominasi dibalik semua agenda upaya counter-terorisme. Istilah terorisme selalu dikonotasikan sama dengan arti Radikal Islam atau Fundamentalisme Islam. Perlakuan yang serampangan ini seringkali menimbulkan stigma yang pada muaranya terbentuknya opini dan keyakinan tidak berdasar.

Pada beberapa hasil dari penelitian diatas akan menjadi rujukan bagi penulis untuk digunakan dalam mengembangkan penelitian. Setiap pengertian atas fenomena yang menjadi obyek penelitian penulis akan di analisa berdasarkan dinamika konseptual yang berkembang. Terlebih terhadap pemaknaan atas beberapa konsep-konsep kunci yang akan menjadi dasar dari penelitian penulis.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

Kajian mengenai kebangkitan gerakan Islam merupakan wacana politik yang berkembang saat ini. Kebangkitan Islam dalam ragam perspektif memberikan acuan kerangka analisa membedah berbagai fenomena gerakan Islam. Salah satu kerangka teoritik dalam menjelaskan

---

<sup>38</sup> Hasan Hanafi dan Muhammad Abid Al Jabiri, *Membunuh Setan Dunia: Meleburkan Timur dan Barat dalam cakrawala Kritik dan Dialog*, Ircisod, 2003, hal. 54.

<sup>39</sup> Riza Sihbudi, “Islam, Radikalisme, dan Demokrasi” dalam Rudhy Suharto dkk, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Mata Pena, hal. 73.

politik kebangkitan Islam ialah dengan menggunakan analisa teori krisis sosial.

Pendekatan teori krisis sosial menjelaskan gerakan-gerakan kebangkitan yang muncul dalam suatu momen tertentu disebabkan kekalahan-kekalahan militer, serangan dari pihak luar, perasaan kemunduran, kondisi umat Islam merasa terancam sehingga mengalami perasaan krisis.<sup>40</sup>

Gelombang kebangkitan Islam sebagai bentuk perasaan ketidakpuasaan atas kondisi kemunduran Islam, ketergantungan ekonomi politik membawa mereka dalam upaya pencarian identitas dan jawaban atas tantangan dihadapi umat Islam saat ini. Krisis ini dijawab dengan mengembalikan Islam sebagai pandangan hidup (way of life), bukan sekedar agama. Hal ini memberikan dorongan kuat bagi politik kebangkitan Islam.

R. Hair Dekmejian menjelaskan siklus krisis dengan kembali melihat setiap periode dalam sejarah Islam. Krisis sosial dan kebangkitan keagamaan dilihat sebagai hubungan sebab akibat (kausal). Krisis dan kebangkitan membentuk pola dalam sejarah Islam.

“...Islam telah menunjukkan kemampuannya yang unik untuk memperbaharui dan menegaskan kembali dirinya melawan ideologi-ideologi yang bersaing dan kekuatan-kekuatan sosial melalui bentuk revivalisnya, suatu mekanisme sosial yang dibangun dari dalam, yang meregenerasi diri, yang dipicu ketika integritas moral atau keberadaan fisik umat Islam dalam keadaan terancam...”<sup>41</sup>

Siklus krisis dan kebangkitan Islam dijelaskan melalui periode-periode tertentu. Masa Khalifah Umar ibn Abd al- Aziz (720 M) dan Ahmad ibn Hambal (855 M) mengalami krisis sosial dan spiritual. Berikutnya era Ibn Hazm (1064 M) kemunduran dan kekalahan Umayyah di Spanyol, hal serupa terjadi di Abbasiyah, menurut Ibn Taimiyah (1328

---

<sup>40</sup> Shireen T. Hunter (ed), *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, Terj Ajat Sudrajat Cet I, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001, hal. xxvi

<sup>41</sup> R. Hair Dekmejian, *Kebangkitan Islam: Katalisator, Kategori dan Konsekuensi* dalam Shireen T. Hunter (ed), *Ibid*, hal. 5



M) terjadi penaklukan oleh Mongol, pada saat yang sama terjadi krisis moral dan ekonomi. Gerakan berikutnya yaitu gerakan Ibn Abd al-Wahhab (1791 M) yang menanggapi kemunduran Turki Utsmani dan krisis moral keagamaan. Gerakan Sanusiyah (1880-an) lahir sebagai respon imperialisme Italia, perpecahan keagamaan, dan kesukuan. Gerakan Mahdiyah merupakan tanggapan terhadap pengaruh kekuasaan pemerintahan Inggris, Mesir, Turki Utsmani, konflik-konflik kesukuan dan kemunduran ekonomi. Salafiyah (1890-an) merupakan respon terhadap penjajahan Eropa. Ikhwanul Muslimin (1930-an) adalah gerakan yang lahir menanggapi krisis sosial, ekonomi politik dan imperialisme Inggris.<sup>42</sup>

Perkembangan selanjutnya memperlihatkan keragaman gerakan Islam dalam masyarakat modern ditentukan oleh kondisi-kondisi tertentu. Pada negara dan masyarakat Islam dengan kondisi berbeda menjadi faktor pembentuk dan pendorong gerakan tersebut. Kondisi yang berbeda-beda ini dapat digeneralisasi meliputi konflik identitas, krisis legitimasi, konflik politik, konflik kelas, krisis budaya, dan ketidakberdayan kekuatan militer. Kondisi-kondisi ini menjadi katalisator bagi kebangkitan gerakan Islam.<sup>43</sup>

Bentuk dari konflik identitas merefleksikan kemerosotan Islam dengan berupaya mencari tafsir lain menerjemahkan kondisi dan tantangan masyarakat Islam. Krisis identitas ini dihadapi individu dan masyarakat Islam. Di Timur Tengah, pada konteks Turki, Iran, dan Arab/Mesir misalnya, nasionalisme pribumi menjadi identitas pengganti. Agenda para reformis nasionalisme melampirkan jalan sekularisasi bagi negara. Pada kenyataannya ini menjadi sulit karena Islam merupakan sistem sosial yang meliputi agama, negara, dan hukum.<sup>44</sup>

Bentuk eksperimen sistem sosial mulai dari sosialisme, kapitalisme, dan korporatisme di bawah berbagai rezim monarki, oligarki

---

<sup>42</sup> R. Hrair Dekmejian, *Kebangkitan Islam: Katalisator, Kategori dan Konsekuensi dalam Shireen T. Hunter (ed), Ibid*, hal. 7-8

<sup>43</sup> Dekmejian, *Loc.Cit*

<sup>44</sup> Dekmejian, *Ibid*, hal. 9

satu partai, otokrasi militer, dan demokrasi konstitusional di negara-negara muslim gagal memberikan kemajuan dalam bidang ekonomi. Ketimpangan distribusi ekonomi merupakan faktor utama menimbulkan protes masyarakat terhadap penguasa, selain kegagalan usaha pembangunan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi menciptakan ketidakstabilan politik. Justru juga menyebabkan ketergantungan negeri-negeri muslim terhadap negara-negara industri.<sup>45</sup>

Situasi sosial ekonomi dalam negara-negara muslim diperparah dengan sikap elit politik dengan perilaku korupsi dan kegagalan membentuk identitas bersama. Akibat krisis legitimasi di tengah masyarakat muslim, mereka mulai mempertanyakan otoritas moral para elit politik. Kondisi ini diperparah dengan upaya elit tersebut membungkam oposisi politik yang ada. Disisi lain, kemampuan militer negara-negara Muslim tidak dapat berhadapan dengan kekuatan Barat, Israel, dan musuh-musuh lainnya.<sup>46</sup>

Kondisi-kondisi ini kemudian membentuk ruang bagi terjadinya krisis yang mendorong lahirnya para revivalis. Pengalaman dari krisis ini juga memicu masyarakat muslim membentuk organisasi radikal atau kelompok militan yang terpisah dari tatanan masyarakatnya. Mereka mendorong perubahan tatanan sosial dan politik yang ada. Dalam hal ini perbedaan kondisi krisis masyarakat Islam modern dibanding krisis sebelumnya yaitu:<sup>47</sup>

1. Pervasif, kondisi krisis itu tidak terbatas pada negara-negara tertentu, namun meresap di seluruh dunia Islam.
2. Konprehensif, krisis-krisis itu meliputi berbagai bidang sekaligus: sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, psikologi, dan spiritual.

---

<sup>45</sup> Dekmejian, *Ibid*, hal. 10

<sup>46</sup> Dekmejian, *Loc.cit*

<sup>47</sup> Dekmejian, *Ibid*, hal 12-13

3. Kumulatif, krisis ini bersifat kumulatif, menggambarkan puncak kegagalan upaya pembangunan bangsa, pembangunan sosial ekonomi, dan keperkasaan militer.
4. Xenophobisme, kebencian terhadap orang asing. Rasa benci pada orang asing melanda masyarakat Muslim.

Prinsip-prinsip pokok dari pandangan para revivalis secara mendasar dijelaskan dalam kerangka yaitu, pertama soal *Din wa al-Daulah* yaitu sistem Islam melingkupi seluruh aturan kehidupan maka agama dan politik tidak terpisah dari sistem kehidupan. Agama memberikan syariat, negara menegakkan pelaksanaan syariat. Kedua, fondasi Islam berdasarkan Al Qur'an dan al-Sunnah. Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial yaitu mengembalikan semangat ketaatan pada nilai-nilai Islam. Dan diwujudkannya keadilan sosial ekonomi ditengah masyarakat. Keempat, Kedaulatan dan Hukum Allah berdasarkan syariat. Tujuannya menegakkan kedaulatan Tuhan karena hanya Tuhan yang berhak menetapkan tatanan dan undang-undang tertinggi. Prinsip kelima adalah jihad. Tujuannya menaklukkan hambatan-hambatan bagi syiar Islam.<sup>48</sup>

Gerakan revivalisme Islam harus berhadapan dengan negara. Kegiatan politik mereka mewacanakan ketidakmampuan penguasa dalam merespon perubahan dan tantangan Islam. Konfrontasi gerakan-gerakan militan Islam dan negara ditentukan tiga faktor yaitu pertama, masalah pembaruan-pembaruan sosial, politik, dan ekonomi yang konprehensif. Diantaranya perbaikan upah, pembersihan perilaku korupsi, birokrasi yang tidak efektif. Selain itu, tidak adanya lembaga dan sarana kritik bagi pemerintahan dapat menyebabkan gerakan militan Islam melawan negara semakin radikal. Kedua, faktor rangsangan eksternal yaitu situasi dan kondisi negara dipengaruhi intervensi kekuatan asing. Misalnya, kekalahan militer Arab terhadap Israel dalam perang, invasi Amerika

---

<sup>48</sup> Dekmejian, Ibid, hal 14-15

Serikat terhadap Afganistan dan Irak, Serangan Uni Soviet terhadap Afganistan. Ketiga, gerakan revivalis Islam ditentukan oleh faktor kualitas kepemimpinan politik dan intelektualnya. Kelompok militan Islam menunjukkan kemampuan untuk memproyeksikan rasa persatuan yang membentuk ikatan diantara gerakan-gerakan revivalis. Ini dibuktikan dengan meningkatnya hubungan transnasional gerakan Islam.<sup>49</sup>

Pada kasus Mesir misalnya Amira El-Azhary Sonbol menjelaskan bahwa ketika sistem sekuler tidak mampu memberikan jalan keluar dari krisis yang disebabkan alienasi budaya dan politik, krisis identitas dan ketidakmampuan ekonomi, maka agama memberikan dukungan sosial dan psikologis. Islam menjadi alternatif struktur-struktur politik, ideologis, dan ekonomis. Isu-isu sosial dan ekonomi memainkan peranan utama menjelaskan gerakan revivalis. Kalangan revivalis Mesir melihat Islam dapat menjadi suatu sarana gerakan yang memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Masyarakat Mesir menerima pelayanan sosial dari kelompok-kelompok revivalis yang tidak dapat diberikan oleh negara. Mereka kemudian mendapat dukungan dan kader militan dalam masyarakat terpinggirkan seperti ini.<sup>50</sup>

Gerakan Islam di Aljazair memberikan pengalaman berbeda, Mohammad Arkoun, dorongan gerakan kelompok revivalis Aljazair berdimensi nasionalis dan ideologis. Masyarakat Aljazair terlibat dalam konflik-konflik kesukuan, yang dipertahan sejak masa kolonialisme. Identitas Arab dan Islam terputus, hubungan negara dan agama terpisah. Peran tradisional para kaum agamawan tidak mendapat tempat digantikan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Identitas Islam merupakan subordinat dalam hubungan negara dan agama. Kontrol negara atas agama dipaksakan dan menekan kelompok militan. Otoritas memonopoli tafsir

---

<sup>49</sup> Dekmejian, *Ibid*, hal 24-26

<sup>50</sup> Amira El Azhary, Mesir, dalam Shireen T. Hunter (ed), *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, Terj Ajat Sudrajat Cet I, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001, hal. 27-28

terhadap Islam walaupun protes terhadap negara. Gerakan revivalis Aljazair lebih banyak bersifat gerakan bawah tanah.<sup>51</sup>

Gerakan revivalis di seluruh dunia Islam memperlihatkan persepsi-persepsi yang luas tentang Islam. Identitas Islam bukannya tanpa saingan, faktor non-Islam di beberapa negara-negara juga merupakan pendorong. Namun sifat-sifat Islam tertentu memberikan sumbangan bagi vitalitas sosial dan politiknya. Di seluruh dunia Islam, selain faktor-faktor kekhususan Islam dan umat Islam menyebabkan kebangkitan gerakan Islam. Gelombang gerakan revivalis menunjukkan kegagalan pemerintahan sekuler di banyak negara-negara.<sup>52</sup>

Konvergensi dari banyak faktor memberikan kontribusi bagi munculnya gerakan-gerakan revivalis. Daya tarik gerakan tersebut ditentukan faktor sosial ekonomi yang dipandang penting seperti meningkatnya intoleransi rakyat terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi, tuntutan persamaan hak, harapan yang besar dan persepsi atas pemenuhan tuntutan dan aspirasi rakyat. Meluasnya lapisan masyarakat Muslim terdidik membangkitkan kesadaran sosial dan politik mereka. Kehadiran masyarakat Muslim perkotaan akibat urbanisasi. Peran elit tradisional semakin redup, dan munculnya politik massa. Selain itu, bangkitnya gerakan revivalis dikalangan Islam juga di dorong keinginan menentukan nasib sendiri, adanya keyakinan kuat bahwa negara-negara Islam di dominasi oleh kekuatan-kekuatan dan ideologi asing.<sup>53</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada isu gerakan sosial radikal Islam yang belakangan muncul dengan sejumlah agenda gerakan yang baru. Disisi lain, selama ini kebijakan deradikalisasi gerakan Islam merupakan

---

<sup>51</sup> Mohammad Arkoun, Aljazair, dalam Shireen T. Hunter (ed), *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, Terj Ajat Sudrajat Cet I, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001, hal. 211

<sup>52</sup> Shireen T. Hunter (ed), *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, Terj Ajat Sudrajat Cet I, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001, hal. 304.

<sup>53</sup> Shireen T. Hunter (ed), *Ibdi*, hal 310.

bagian dari kampanye anti terorisme yang dikembangkan di Indonesia. Kebijakan ini menempatkan Indonesia bagian dari kerjasama anti terorisme di dunia internasional.

Namun sejumlah masalah praktek deradikalisasi menimbulkan persoalan stigma negatif terhadap kelompok Islam. Stigma terorisme menjadi persoalan ditengah masyarakat terutama ketika pemerintah berusaha meregulasi aktivitas keagamaan. Tidak sekedar itu, pemerintah berusaha mengembangkan tafsir terhadap perilaku keagamaan yang boleh dikerjakan di tengah masyarakat. Ketakutan berlanjut melalui praktek mengatur sejumlah atribut-atribut kelompok-kelompok Islam radikal. Bahkan pemerintah berusaha mengatur apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan terkait masalah-masalah keagamaan.

Oleh karena itu, penelitian ini adalah reaksi gerakan sosial Islam terhadap agenda perubahan sosial yang mereka usung. Selan itu, kelompok-kelompok gerakan Islam radikal merupakan bagian dari kekuatan civil society ditengah masyarakat. Oleh karena itu, gerakan Islam radikal diharapkan mampu mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

Data-data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan gabungan antara data primer berupa data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber seperti pelaku teror, aktivis gerakan Islam radikal, kelompok mahasiswa Islam dan kelompok masyarakat lainnya. Serta menggunakan data sekunder berupa dokumen yang menunjukkan statistik jumlah aktivitas teror, jumlah kelompok gerakan Islam, dan laporan aktivitas gerakan Islam radikal.

## 1. Jenis Penelitian

Dasar metode penelitian yang digunakan riset ini ialah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu model penelitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai subyek

utama dalam peristiwa sosial.<sup>54</sup> Dalam hal ini, peneliti berusaha menyelami arti kenyataan sosial dan hubungannya dengan orang-orang yang berinteraksi dalam kondisi tertentu.<sup>55</sup> Pengalaman merupakan sesuatu yang unik dan interaksi di antara individu-individu memberikan pengertian pada sejumlah kenyataan sosial.

## 2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Penelitian berusaha mengamati pendirian dan perubahan organisasi dan kelompok gerakan sosial Islam dengan fokus pada Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Dengan jangkauan penelitian sejak pendirian JAT tahun 2008 hingga dibubarkan 2016. Fokus utama dari lokasi pengambilan data dan informasi ialah di dalam penjara tempat sebagian anggota kelompok ini ditahan atas vonis kasus terorisme. Selain itu, periset juga mendatangi sekretariat organisasi JAT dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan perkumpulan ini.

## 3. Sumber Data

- a. Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang berupa dokumen laporan hasil investigasi langsung dan hasil wawancara kepada subyek narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kajian literature-literatur, atau dalam sejumlah dokumen dari media cetak atau internet.

## 4. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Teknik observasi ialah mengamati secara dekat proses dan dinamika prilaku dari obyek penelitian dalam situasi yang ada. Melalui proses observasi peneliti akan terlibat langsung dengan obyek yang menjadi fokus penelitiannya. Dengan kata lain, tujuan utama observasi yaitu pertama, mengamati interaksi manusia

---

<sup>54</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, Refika Aditama, 2012, hal. 55.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 65.

sebagai peristiwa aktual dengan proses yang membentuknya. Kedua, menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, penyajian ulang dengan sekelumit penafsiran atas realitas. Berikutnya eksplorasi, yaitu mengarahkan pandangan hal-hal menjadi fokus utama, dengan membuka kemungkinan-kemungkinan di luar yang telah diketahui subyek.<sup>56</sup>

b. Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan penulisan ini diperoleh dari ditentukan dengan cara mengadakan interview, yaitu mengadakan wawancara secara langsung. Wawancara ialah kegiatan komunikasi yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan mendapatkan informasi.<sup>57</sup> Melalui wawancara peneliti melakukan konfirmasi ulang atas sejumlah fakta dengan pengembangan proses deskripsi dan eksplorasi yang lebih jauh kepada narasumber.

c. Studi Literatur

Yaitu untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungan dengan objek penelitian, Untuk mendapatkan data ini penulis memperolehnya melalui buku-buku literatur, serta dokumen pemerintah dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Analisis data

Data yang di peroleh dari penelitian akan diuraikan dengan analisis data secara kualitatif yang dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya deskriptif yaitu menganalisis hasil penelitian ke dalam bentuk penggambaran yang berupa uraian kalimat saling menguatkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh

---

<sup>56</sup> James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Rafika Aditama, 2009 hal. 287-288.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 306.



## **H. Sistematika Penulisan**

Gambaran penulisan isi tesis akan memuat informasi sistematika pokok bahasan dari tiap-tiap bab yang dilampirkan sebagai berikut:

Bab Satu, menguraikan latar belakang penelitian yang menjadi gambaran pokok persoalan yang diangkat penulis. Bagian berikutnya, yaitu tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan rumusan masalah akan fokus pada batasan obyek persoalan yang ada. Untuk mengurai lebih jauh maka penulis menyertakan studi pustaka sebagai bahan rujukan penelitian sebelumnya. Selanjutnya memuat bagian kerangka teori, yang menjadi dasar analisis untuk mengolah data dan menjelaskan lebih jauh fenomena dari obyek yang diteliti. Dan bagian berikutnya yaitu, metodel penelitian akan menjadi alat bagi peneliti untuk mengumpulkan data. Terakhir diisi dengan sistematika penulisan dari penelitian.

Bab Dua, menjelaskan perkembangan Gerakan Sosial Islam Kontemporer di Indonesia.

Bab Tiga, sejarah berdirinya Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)

Bab Empat, dinamika perubahan agenda gerakan sosial Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dalam merespon dorongan internal dan tuntutan eksternal.

Bab Lima, berisi pokok kesimpulan dari bahasan sebelumnya.